

PKM Kewirausahaan Sosial

Thamrin Tahir¹, Tuti Supatminingsih², Muhammad Ilyas Thamrin Tahir³, Muhammad Hasan⁴,
Nur Arisah⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Abstrak. Mitra Program Kemitraan Komunitas (PKM) ini adalah Kepala Sekolah, Guru, dan Staf SDN 27 Palakku. Adapun permasalahan prioritas yang mendasari kegiatan pelatihan ini adalah masih terdapat banyak masalah yang dihadapi oleh usaha ini. Secara umum berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat kawasan Bantimurung adalah (1) Hampir setengah usaha kecil di Kawasan Bantimurung mempergunakan kapasitas 60 persen atau kurang. Masalah-masalah utama yang dihadapi adalah sebelum investasi, menghadapi masalah pemasaran, kemudahan usaha (lokasi dan izin), pengenalan usaha: pemasaran, permodalan, hubungan usaha, peningkatan usaha: pengadaan bahan/ barang. (2) Usaha menurun karena kurang modal, kurang mampu memasarkan, kurang keterampilan, dan administrasi. (3) Mengharapkan bantuan pemerintah berupa modal, pemasaran, dan pengadaan barang. (4) 60 persen menggunakan teknologi tradisional. (5) 70 persen melakukan pemasaran langsung ke konsumen. Dan (6) Untuk memperoleh bantuan perbankan, dokumen-dokumen yang harus disiapkan dipandang terlalu rumit. Metode yang digunakan adalah: ceramah, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan mitra pendamping. Hasil yang dicapai adalah (1) Kegiatan pelatihan kewirausahaan tentunya memberikan nilai tambah bagi Kepala Sekolah, Guru, dan Para Staf SDN 27 Bulutana, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Nilai tambah yang dimaksud adalah masyarakat dapat meningkatkan minat, motivasi, dan jiwa kewirausahaannya serta mengarahkan perilakunya ke arah perilaku berwirausaha yang lebih positif. Dan (2) Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan pelatihan dapat dikemukakan bahwa pelatihan tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh tim pelaksana. Hal ini dengan antusiasnya peserta pelatihan mengikuti materi serta praktek yang diberikan.

Kata kunci: Kewirausahaan Sosial

Abstract. The partner of this Community Partnership Program (PKM) are the Principal, Teachers, and Staff of SDN 27 Palakku. The priority problem that underlies this training activity is that there are still many problems faced by this business. In general, the various problems faced by the people of the Bantimurung area are (1) Almost half of the small businesses in the Bantimurung area use 60 percent capacity or less. The main problems faced were before investing, facing marketing problems, business convenience (location and permits), business introduction: marketing, capital, business relations, business improvement: procurement of materials/goods. (2) Business declines due to lack of capital, inability to market, lack of skills, and administration. (3) Expect government assistance in the form of capital, marketing, and procurement of goods. (4) 60 percent use traditional technology. (5) 70 percent do direct marketing to consumers. And (6) To obtain banking assistance, the documents that must be prepared are considered too complicated. The methods used are: lectures, demonstrations, discussions, questions and answers, and companion partners. The results achieved are (1) Entrepreneurship training activities certainly provide added value for the Principal, Teachers, and Staff of SDN 27 Bulutana, Bantimurung District, Maros Regency. The added value in question is that the community can increase their interest, motivation, and entrepreneurial spirit and direct their behavior towards more positive entrepreneurial behavior. And (2) Based on the observations made on the implementation of the training, it can be stated that the training went smoothly as expected by the implementing team. This is with the enthusiasm of the training participants following the material and practice provided.

Keywords: Social Entrepreneurship

I. PENDAHULUAN

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, dalam pembangunan ekonomi yang secara eksplisit dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945

menjelaskan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4).

Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap UKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah



SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN 2021

"Penguatan Riset, Inovasi, dan Kreativitas Peneliti di Era Pandemi Covid-19"

ISBN: 978-623-387-015-3

tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat, sehingga selain upaya pencapaian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Salah satu sektor usaha yang layak dikedepankan dalam upaya menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat adalah sektor usaha kecil. Usaha kecil mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Sektor usaha kecil Indonesia selama 6 (enam) Repelita dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1999 tumbuh dengan laju rata-rata diatas 10 persen/tahun, hal ini selaras dengan pertumbuhan PDB ekonomi yang tumbuh dengan rata-rata 7 persen/tahun. Pada periode ini negara tetangga ASEAN seperti Malaysia dan Thailand tumbuh dengan rata-rata 7,8 persen dan 7,2 persen.

Krisis telah menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan hebat dimana untuk pertama kalinya sejak 30 tahun, yaitu pada tahun 1998 perekonomian berkontraksi hingga 14,6 persen. Namun secara berangsur-angsur ekonomi Indonesia mampu membaik kembali walaupun belum dapat mencapai tingkat pertumbuhan sejauh 30 tahun yang lalu, di samping masih berfluktuasi.

Tahun 2001 PDB Indonesia hanya tumbuh 3,98 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2000 yang mencapai 5,19 persen. Tahun 2002 pertumbuhan sedikit lebih baik dari tahun 2001 dan pada tahun 2003 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5 persen.

Peran PDB sektor industri terhadap PDB nasional sedikit meningkat dari 25,24 persen naik menjadi 25,71 persen dan 26,01 persen pada tahun 1999, 2000 dan 2001. Namun hal ini tidak diikuti peningkatan peran PDB Usaha Kecil Menengah (UKM). Peran PDB sektor ini hanya berkisar antara 38 hingga 39 persen pada tahun 1999 hingga tahun 2000, sektor usaha perannya sangat didominasi oleh usaha besar. Hingga saat ini sumbangan sektor usaha besar sekitar 61 persen terhadap PDB sektor usaha secara keseluruhan.

Berbagai masalah riil yang terjadi di lapangan

dapat menghambat kontribusi usaha kecil dalam memberdayakan masyarakat di Kabupaten Maros pada umumnya. Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh berbagai industri kecil di Indonesia hampir sama. Untuk mendukung hal tersebut, berikut ini akan disajikan beberapa temuan penelitian yang menyangkut permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil.

Hasil Penelitian PSE KP UGM, LPEM-FEUI dan PSP-IPB (2008) pada kasus pengentasan kemiskinan di Pulau Jawa melalui pemberdayaan usaha kecil, menunjukan bahwa terdapat 7 aspek yang menjadi masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh industri kecil di Pulau Jawa. Ketujuh aspek tersebut, meliputi masalah produksi, pembiayaan/perbankan, sumberdaya manusia, pemasaran/promosi, kemitraan, manajemen usaha serta peran pemerintah dan LSM.

Menurut Tambunan (1997), permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh usaha kecil adalah permasalahan di bidang manajemen. Sektor industri kecil masih kurang mampu menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usaha.

Anoraga dan Sudantoko (2002) mengemukakan bahwa permasalahan usaha kecil pada bidang pemasaran terfokus pada tiga hal, yaitu permasalahan persaingan pasar dan produk, permasalahan akses terhadap informasi pasar dan permasalahan kelembagaan pendukung usaha kecil.

Pendapat di atas sejalan dengan hasil penelitian Munarfah, dkk (2007), yang menyatakan bahwa terjadi kondisi yang masih relatif stagnan atau kurang berkembang dalam hal perdagangan karena terjadinya *inefficiency* operasional usaha. Kasus tersebut terjadi di Propinsi Sulawesi Selatan.

Hasil diskusi dan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masalah yang dihadapi oleh usaha ini. Secara umum berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat kawasan Bantimurung adalah (1) Hampir setengah usaha kecil di Kawasan Bantimurung mempergunakan kapasitas 60 persen atau kurang. Masalah-masalah utama yang dihadapi adalah sebelum investasi, menghadapi masalah pemasaran, kemudaha usaha (lokasi dan izin), pengenalan

usaha: pemasaran, permodalan, hubungan usaha, peningkatan usaha: pengadaan bahan/ barang. (2) Usaha menurun karena kurang modal, kurang mampu memasarkan, kurang keterampilan, dan administrasi. (3) Mengharapkan bantuan pemerintah berupa modal, pemasaran, dan pengadaan barang. (4) 60 persen menggunakan teknologi tradisional. (5) 70 persen melakukan pemasaran langsung ke konsumen. Dan (6) Untuk memperoleh bantuan perbankan, dokumen-dokumen yang harus disiapkan dipandang terlalu rumit.

II. METODE YANG DIGUNAKAN

- Kelompok usaha mampu meningkatkan produktivitas usaha, sehingga mampu memiliki daya saing.
- Kelompok usaha mampu melakukan pengembangan usaha, termasuk melakukan diversifikasi produk.
- Kelompok usaha mampu memiliki modal yang layak untuk mengembangkan usahanya

III. PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

A. Penyampaian Materi

Pada tahap ini, mitra sasaran dalam kegiatan ini adalah Kepala Sekolah, Guru, dan Para Staf SDN 27 Palakku, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Dalam kegiatan ini, mitra berpartisipasi dalam mengikuti penyampaian materi maupun diskusi kelompok yang disampaikan oleh narasumber.



Gambar 1. Penyampaian Materi Tentang Kewirausahaan

Adapun materi yang diberikan mengenai:

1. Karakter

Setiap individu memiliki ciri khas dalam bentuk perilaku yang membedakan dirinya dengan orang lain, ciri khas tersebut merupakan bentuk dari karakter seseorang. Secara bahasa, karakter berasal dari bahasa Yunani, *charassein* yang artinya mengukir. Sifat ukiran adalah melekat kuat di atas benda yang diukir. Tidak mudah usang tertelan waktu atau arus terkena gesekan (Mutis, T., 1995). Dari uraian tersebut sangat jelas bahwa karakter merupakan ciri seseorang yang bersifat paten dalam perilaku seseorang.

Pada hakekatnya karakter lebih mengarah pada tingkah laku seseorang yang positif, hal itu terlihat dari definisi yang menyebutkan bahwa karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral. Manifestasi sifat alamiah itu mewujudkan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggungjawab, menghormati orang lain, dan karakter mulia lainnya (Suryana, A.S. 1995). Selain itu terdapat definisi lain yang menyebutkan bahwa karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain (Nurdiana, N, 2020).

Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal I UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Sedangkan dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003: 8) pada Pasal 3, menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.



Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Pada dasarnya karakter merupakan perilaku individu yang menjadi ciri khas tersendiri dalam menjalani hidupnya dan dalam bagaimana ia menyikapi maupun bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Dari beberapa pengertian tentang karakter yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan bahwa karakter memiliki pengertian sebagai sifat maupun tingkah laku individu yang luhur dan menjadi ciri khas tersendiri bagi seorang individu.

2. Enterpreneur

Kata *entrepreneur* berasal dari bahasa Prancis, *entreprendre*, yang sudah dikenal sejak abad ke-17, yang berarti berusaha. Dalam hal bisnis, maksudnya adalah memulai sebuah bisnis. Kamus Merriam-Webster menggambarkan definisi *entrepreneur* sebagai seseorang yang mengorganisir dan menanggung resiko sebuah bisnis atau usaha. Menurut Nurdiana, N (2020) *entrepreneurship* (kewirausahaan) adalah penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Menurut Mustari, M, dkk, (2021) *entrepreneur* adalah seseorang yang mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang inovatif. Istilah *entrepreneurship* (kewirausahaan) pada dasarnya merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan (*ability*) dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. *Entrepreneurship* adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan dan proses yang dilakukan oleh para *entrepreneur* dalam merintis, menjalankan dan mengembangkan usaha mereka.

Entrepreneurship merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Dari

pandangan para ahli dapat disimpulkan bahwa *entrepreneurship* adalah kemampuan dalam berfikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan sebagai dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat dan proses dalam menghadapi tantangan hidup.

3. Kewirausahaan Sosial

Pandangan para ahli mengenai kewirausahaan sosial bersifat multidimensi dan telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Hasan, M, dkk, (2021) memandang bahwa kewirausahaan sosial dimaknai sebagai proses dimana warga masyarakat membangun atau menstranformasikan lembaga untuk mengembangkan berbagai solusi bagi masalah sosial seperti kemiskinan, kesakitan, kebutaaksaraan, kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dll. supaya terbangun kehidupan sosial yang baik untuk semua (Hutamy, E. T, dkk, 2021). Dalam pengertian ini, wirausahawan sosial yaitu orang yang melakukan perubahan sosial, menciptakan kombinasi baru dari sumber daya dan orang-orang yang secara signifikan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengatasi masalahnya. Wirausahawan sosial bertindak untuk menciptakan nilai publik, memanfaatkan peluang baru, berinovasi dan beradaptasi, bertindak secara tepat, meninggalkan sumberdaya yang tidak bisa mereka kendalikan, dan mengembangkan rasa tanggung jawab yang kuat.

Kewirausahaan sosial didefinisikan sebagai aktivitas yang bernilai sosial dan inovatif yang terjadi dalam atau lintas sektor nonprofit, bisnis, dan pemerintahan. Inpres No. 4, (1994) menekankan pula bahwa karakteristik kewirausahaan sosial mencakup: 1) inovasi, yang berarti kewirausahaan merupakan proses kreatif yang menggunakan suatu kesempatan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, 2) penciptaan nilai sosial, dimana tujuan sosial dari kegiatan wirausaha sosial dinyatakan dengan jelas, dan 3) loci yang bermakna bahwa aktivitas kewirausahaan sosial terjadi dalam semua sektor dan interaksi kolaboratifnya (Munandar, A. S., 1999). Senada dengan pernyataan ahli di atas, Hutamy, E. T, dkk, (2021) menyatakan kewirausahaan sosial memiliki dimensi: *socialibility*,

market orientation, dan innovation. Ketiga dimensi ini merupakan satu kesatuan dalam konsep kewirausahaan sosial. Dimensi sosial mengandung makna bahwa aktivitas wirausahaan sosial tidak lepas dari kegiatan yang terkait dengan konteks kehidupan sosial misalnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengangguran, peningkatan kesehatan masyarakat, dsb., melibatkan berbagai pihak dalam operasionalnya, dan mengandung makna bahwa aktivitas kewirausahaan ini dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Orientasi pasar menunjukkan bahwa aktivitas kewirausahaan sosial dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan masyarakat melalui usaha sosial (*social enterprise*).

Secara khusus mengenai aspek dimensi inovasi, terdapat dua pandangan yaitu pendekatan individual dan pendekatan berorientasi proses. Pendekatan pertama menggambarkan bahwa seorang wirausahawan, sebagaimana dalam konteks wirausahaan ekonomi, adalah mereka yang memiliki keunggulan pribadi, "*business hero*", atau "*opinion leader*". Dalam hal ini, seorang wirausahaan sosial dipahami sebagai orang yang mampu menjadi inovator, berani ambil resiko, memiliki kepemimpinan, atau memiliki keunggulan tertentu. Pandangan kedua mengungkapkan bahwa seorang wirausahaan sosial yang berhasil adalah mereka yang mampu menciptakan nilai sosial baru dengan mengelola sumber daya untuk menghasilkan produktivitas dan efektivitas. Mereka adalah orang yang mampu melakukan "*descriptive*". (Mustari, M., dkk, 2021) mengungkapkan wirausahawan sosial yang berhasil memainkan peran sebagai agen perubahan dalam sektor social.

Pendapat lain memandang bahwa kewirausahaan sosial merupakan kombinasi atau saling keterkaitan dari komponen atau aktivitas kewirausahaan, inovasi dan isu-isu sosial. Kewirausahaan sosial merupakan proses dinamis yang berusaha untuk mengeksplorasi inovasi yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bersumber dari interaksi diantara dimensi individu, organisasi, lingkungan dan proses yang secara kolektif mengawali, mengarahkan atau

berkontribusi perubahan sosial (Hasan, M. Dkk, 2021).

Mahasiswa pendidikan luar sekolah setelah menyelesaikan studinya diharapkan bertindak sebagai wirausahaan sosial dalam mengembangkan masyarakat yang menjalankan fungsi sebagai advocate, broker, dan catalist (Holt D.H., 1992). Sebagai advocate, broker, catalist. Sebagai advocate, ia menjamin bahwa kebutuhan dan permintaan masyarakat secara persuasif dibawa pada perhatian atau urusan agent-agent publik yang relevan dan menggunakan berbagai sumber pengaruh dengan badan/organisasi di luar yang dapat mengembangkan partisipasi anggota mereka dalam program dan pelayanan. Sebagai broker, ia bertindak sebagai perantara dalam pemerolehan dana atau skills dari sumber daya dan menyediakan sumber daya manusia yang tepat. Sebagai catalist, seorang wirausahawan mensitumilasi perencanaan dalam koralaborasi dengan agent-agent lain atau usaha-usaha voluntir seperti dengan menyusun kelompok kerja, dan melakukan peran aktif, mendaftarkan dukungan dan saran pihak luar dan menyediakan modal "awal/pemicu" untuk mengembangkan program baru. Ciptono, W. S., (1999) mencontohkan bahwa tiga peran dimaksud dalam bidang pendidikan yaitu seorang wirausahaan sosial dapat melakukan negosiasi terhadap negara untuk meningkatkan mutu sekolah publik (*advocate*), menginisiatifi diksusi masyarakat dengan negara/pemerintah (*catalist*), dan menjamin koordinasi antara program perlindungan anak dan sekolah.

B. Mengadakan Tanya Jawab Dengan Peserta Pelatihan

Pada tahapan ini peserta pelatihan yaitu guru-guru SDN 27 Palakku diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi pelatihan yaitu literasi kewirausahaan. Kemudian pertanyaan dari peserta akan dijawab oleh pematari.



Gambar 2. Tanya Jawab Dengan Peserta Pelatihan

C. Penutup

Pada tahapan ini, tim pengabdian bersama dengan peserta pelatihan mengadakan foto bersama.



Gambar 3. Foto Bersama Tim Pengabdian dan Peserta

IV. KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan kemitraan masyarakat dapat ditarik kesimpulan:

- a. Kegiatan pelatihan kewirausahaan tentunya memberikan nilai tambah bagi Kepala Sekolah, Guru, dan Para Staf SDN 27 Bulutana, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Nilai tambah yang dimaksud adalah masyarakat dapat meningkatkan minat, motivasi, dan jiwa kewirausahaannya serta mengarahkan perilakunya ke arah perilaku berwirausaha yang lebih positif.

- b. Berdasarkan observasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan pelatihan dapat dikemukakan bahwa pelatihan tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh tim pelaksana. Hal ini dengan antusiasnya peserta pelatihan mengikuti materi serta praktek yang diberikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada kepada Rektor UNM atas arahan dan pembinaannya selama proses kegiatan Pengabdian Masyarakat berlangsung. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNM dan Kepala Sekolah, Guru, dan Staf SDN 27 Pakallu, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang telah memberi fasilitas, melakukan monitoring, dan meng-evaluasi kegiatan PKM hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ciptono, W. S., 1999, *Entrepreneurship Management Entering the Fifth Generation of Global Management Evolution: Total Quality of Ultrapreneurship Management*, Lokakarya Perkembangan Tes Potensi Kewirausahaan Versi Indonesia, Pusbangnis LPKwu, 11 - 12 Januari, Surakarta.
- Hasan, M., Arisah, N., Sasmita, F. A., Miranda, M., Putri, A. A., & Pattisina, C. D. (2021). Perilaku Berwirausaha Generasi Milenial di Era Pandemi COVID-19. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 13(1), 224-240.
- Holt D.H., 1992, *Entrepreneurship: New Venture Creation*, Prestice Hall, New Jersey.
- Hutamy, E. T., Marham, A., Alisyahbana, A. N. Q. A., Arisah, N., & Hasan, M. (2021). Analisis Penerapan Bisnis Model Canvas pada Usaha Mikro Wirausaha Generasi Z. *Jurnal Bisnis dan Pemasaran Digital*, 1(1), 1-11.
- Inpres No. 4, 1994, *Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan*, Jakarta.
- Munandar, A. S., 1999, *Konsep Teoritis Entrepreneurship Komparasi Konsep Barat dan Indonesia (Pengertian, Komponen, Diri Kepribadian dan Perilaku Kewirausahaan)*, Lokakarya Perkembangan Tes Potensi Kewirausahaan Versi Indonesia, Pusbangnis LPKwu, 11-12 Januari, Surakarta.
- Mustari, M., Arisah, N., Thaief, I., Fatmawati, F., & Hasan, M. (2021, August). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Orientasi Pasar terhadap Kinerja UMKM di Kota Makassar. In *Seminar Nasional*



- Teknologi Pendidikan (Vol. 1, No. 1, pp. 165-177).
- Mutis, T., 1995, *Kewirausahaan yang Berproses*, Grasindo, Jakarta.
- Nurdiana, N., Hasan, M., Arisah, N., Riesso, A. S., & Hasanah, D. F. (2020). An Analysis of the Effect of Economic Growth, Inflation, and Open Unemployment on Poverty in South Sulawesi Province. *Journal of Research in Business and Management*, 8(9), 14-17.
- Suryana, A.S., Imelda R., Idris S., Agus A, Eymal B.O., Suardi B., dan Rusli M.R., 1995, *Mulai dengan Usaha Kecil Merintis Karir Kewirausahaan Anda*, Pusat Pengembangan Usaha Kecil Kawasan Timur Indonesia, UjungPandang.